

ABSTRAK

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) adalah sebuah dokumen resmi rencana daerah, RKPD mempunyai kedudukan yang strategis. Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) mempunyai kaitan dengan visi dan misi yang diemban oleh Pemerintah Daerah. Visi dari Kabupaten Barito Utara adalah "TERWUJUDNYA PERCEPATAN PEMBANGUNAN DI BERBAGAI BIDANG SERTA PENINGKATAN EKONOMI MASYARAKAT SECARA BERKEADILAN MENUJU KABUPATEN BARITO UTARA YANG LESTARI DAN SEJAHTERA". Yang mana selanjutnya "MENINGKATKAN SISTEM PENYELENGGARAAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK (*GOOD GOVERNANCE*) DAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN SERTA PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI YANG MENEMPATKAN SUMBERDAYA MANUSIA APARATUR YANG TEPAT PADA TEMPAT YANG BENAR" menjadi salah satu misi dari Kabupaten Barito Utara. Namun sejauh ini Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Utara khususnya belum ada upaya atau usaha untuk mengukur secara pasti dan jelas sampai dimana tingkat dan bentuk partisipasi masyarakat yang telah berjalan selama ini sesuai dengan visi dan misi daerah yang diemban. Ditakutkan dengan rendahnya pelibatan masyarakat didalam proses penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah maka akan menimbulkan dampak yang negatif sebagaimana berikut : (1) rendahnya rasa memiliki dari masyarakat atas program yang disusun, akibatnya keberlanjutan dari program yang dilaksanakan dapat terhambat atau bahkan tidak terwujud; (2) program yang tidak sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik masyarakat.

Penelitian ini mengambil lokasi di Kecamatan Tewehe Tengah. Kecamatan Tewehe Tengah adalah kecamatan percontohan yang berada dalam wilayah administrasi Kabupaten Barito Utara Provinsi Kalimantan Tengah. Beberapa prestasi tingkat Nasional diraih dengan tiga kali berturut-turut meraih Adipura dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yaitu pada tahun 2013, 2014 dan 2015. Kecamatan Tewehe Tengah merupakan Kecamatan Kota yang berada di wilayah Kabupaten Barito Utara, dan menjadi pusat dari Pemerintahan Daerah Kabupaten Barito Utara.

Penelitian ini berupaya untuk menjawab permasalahan bagaimanakah tingkat Partisipasi Masyarakat di Kecamatan Tewehe Tengah dalam Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Barito Utara Tahun 2016 disertai kenapa tingkat partisipasi masyarakat kecamatan tewehe tengah berada pada tingkat itu?. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan kajian tingkat partisipasi masyarakat di Kecamatan Tewehe Tengah dalam proses Penyusunan RKPD Kabupaten Barito Utara Tahun 2016. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif yang didukung dengan deskriptif kualitatif, kemudian selanjutnya untuk proses analisis menggunakan *Skala Likert* dan distribusi frekuensi.

Hasil penelitian menunjukkan menurut tipologi Arnstein tingkat partisipasi masyarakat di Kecamatan Tewehe Tengah dalam penyusunan RKPD berada pada tingkat *Consultation* (Konsultasi) dalam tangga partisipasi yang dalam hakekat kesertaan masyarakat didengar tetapi tidak selalu dipakai sarannya. Hal ini dibuktikan dengan total skor yang diperoleh dari hasil analisis adalah berjumlah 678 poin, yang dikategorikan ke dalam derajat Tokenism penghargaan/formalitas (*degree of tokenism*). Kenapa tingkat partisipasi masyarakat di Kecamatan Tewehe Tengah dalam penyusunan RKPD berada pada tingkat pembagian kekuasaan tokenism (penghargaan / formalitas) ini dapat dipahami dari usulan program musrenbang Kecamatan Tewehe Tengah sebanyak 487 usulan program yang dirumuskan dalam musrenbang Kecamatan Tewehe Tengah disarikan menjadi 34 program dan kegiatan. Hal ini terkait antara lain dengan kepentingan SKPD, penyesuaian kriteria program pembangunan dan kepentingan yang diamanatkan dalam RPJMD, kesesuaian kepentingan dengan urgensi kondisi masyarakat dan prioritas program pembangunan yang telah ditetapkan serta kemampuan pembiayaan pembangunan yang tertera dalam Pagu Indikatif Sementara (PIS) Kabupaten Barito Utara.

Kata Kunci : Tingkat Partisipasi Masyarakat, Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).

ABSTRACT

Regional Development Plan (RKPD) is an official document plan, RKPD has a strategic position. Regional Development Plan (RKPD) has a link with the vision and the mission carried by the local government. Vision of North Barito regency is "ACTUALIZING ACCELERATION OF REGIONAL DEVELOPMENT IN VARIOUS FIELDS AND INCREASING PEOPLE'S ECONOMY TO ACHIEVE SUSTAINABLE AND PROSPEROUS OF THE NORTH BARITO REGENCY". Which hereinafter "IMPROVING SYSTEM ENFORCEMENT OF GOOD GOVERNANCE AND SOCIETY'S PARTICIPATION IN THE REGIONAL DEVELOPMENT AND IMPLEMENTATION OF BUREAUCRACY REFORM OF THE HUMAN RESOURCE APPARATUS PUTTING THE RIGHT PLACE AT THE RIGHT" to be one of the missions of North Barito regency. But so far Barito Utara Regency in particular has been no attempt or effort to measure and clear to which extent and form of society participation that has been running in accordance with the vision and mission areas embrace. Feared by the low involvement of the community in the process of preparing the Work Plan for Regional Regional Development it will cause a negative impact as follows: (1) lack of a sense of community on the compiled program, consequently the sustainability of programs implemented may be delayed or even not materialize; (2) programs that are not in accordance with the needs and characteristics of the community.

This research took place in the District Central Teweh. Subdistrict Central Teweh is a pilot districts that are within the administrative area of North Barito regency, Central Kalimantan Province. Some of the accomplishments achieved by the National level three times in a row won the Adipura of the Ministry of Environment and Forestry in 2013, 2014 and 2015. The District of Central Teweh the City District is located in the district of North Barito, and became the center of the Regional Government Barito North.

This research seeks to answer the problems of how the level of public participation in district Central Teweh in drafting regional development work plan (RKPD) North Barito Regency in 2016 accompanied why public participation rates are central teweh subdistrict at that level?. This research aims to study the level of public participation in the District Central Teweh at the process of drafting the RKPD North Barito Regency in 2016. The methods used in this research is quantitative descriptive which is supported by the qualitative descriptive, and then further to the analysis process using Likert Scale and frequency distribution.

The results showed according to the typology of Arnstein public participation rates in district Teweh Tengah in the preparation RKPD be at the level of Consultation (the consultation) in the ladder of participation in public participation nature are heard but not always used advice. This is evidenced by the total score obtained from the results of the analysis are the numbered 678 points, categorized into Tokenism award / degree of formality (degree of tokenism). Why is the level of public participation in district Central Teweh in drafting the RKPD are at the level of Division of power tokenism (awards / formalities) can be understood from the proposed Subdistrict Musrenbang Teweh Tengah program as many as 487 proposed a programme formulated in Central Teweh Subdistrict musrenbang abstracted into 34 programs and activities. It is concerned among other things with the interests of the SKPD, the adjustment of the criteria development programs and interests that was mandated in the RPJMD, the alignment of interests with the urgency of the condition of the community and the priorities of development programs that have been established and the capacity development financing provided in Pagu Indikator Sementara (PIS) North Barito Regency.

Keywords: Level of Public Participation, Regional Development Plan (RKPD).